

ARKEOLOGI MARITIM
Kajian Awal untuk Pengembangan
Highlight Penelitian Balai Arkeologi Ambon*

Syahrudin Mansyur

1. Pendahuluan

Salah satu bidang kajian arkeologi yang potensial untuk dikembangkan di wilayah kepulauan Maluku (Provinsi Maluku dan Maluku Utara) adalah arkeologi maritim. Orientasi kajian arkeologi maritim sendiri terletak pada setiap aktifitas manusia melalui tinggalkan sarana manusia yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kemaritiman di masa lampau (Najemain, 2001). Selanjutnya, Edy Sedyawaty (2001), menyebutkan bahwa arkeologi maritim meliputi dua ranah garapan yaitu; *pertama*, mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan kelautan dan pelayaran namun datanya terdapat di daratan dan *kedua*, menangani segala tindakan di bawah air yang berkaitan dengan peninggalan masa lampau.

Seperti halnya kajian-kajian lain dalam ilmu arkeologi, kajian kemaritiman lebih dulu dikembangkan di dunia barat. Keith Mulkeroy (1978) dalam bukunya “Maritime Archaeology” telah memberikan definisi dan ruang lingkup arkeologi maritim. Pembahasan tentang dunia kemaritiman dikenal beberapa istilah yaitu kebudayaan maritim (maritime culture) yang membicarakan kemaritiman tradisional dalam kerangka kontemporer. Etnologi maritim (Maritime Ethnology) sebagai sub disiplin antropologi maritim yang bekerja dengan cara melihat bukti-bukti tradisi kemaritiman lewat peninggalannya, dalam konteks sosial, ekonomi dan lainnya. Lebih lanjut Mulkeroy menjelaskan bahwa subyek arkeologi maritim direlasikan dengan dua topik kajian yaitu arkeologi perkapalan/pelayaran (nautical archaeology) dan arkeologi bawah air (under water archaeology). Berangkat dari ruang lingkup di atas Najemain dalam makalahnya yang disampaikan pada

* Makalah ini pernah disampaikan dalam Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi pada tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

Diskusi Ilmiah Arkeologi (DIA) XII di Makassar menawarkan perlunya pengembangan satu kajian yang disebutnya “etnoarkeologi maritim” (maritime ethnoarchaeology). Pengembangan ini dimaksudkan untuk menjembatani ilmu arkeologi dengan kajian-kajian kebudayaan kemaritiman dan teknologi kemaritiman (Najemain, 2001).

Pada dasarnya kajian kemaritiman dalam dunia arkeologi di Indonesia telah dimulai pada saat dilakukannya penelitian tentang berbagai hal yang terkait dengan kelautan dan pelayaran. Khusus untuk Kepulauan Maluku tinggalan-tinggalan arkeologi yang berasal dari masa prasejarah telah memberikan gambaran tentang dunia kemaritiman di nusantara. Tinggalan tersebut dapat berupa lukisan dinding bermotif perahu, wadah kubur berbentuk perahu dan situs megalitik berbentuk perahu serta pagar keliling menyerupai bentuk perahu.

Pada tahun 1980-an kajian ini kemudian berkembang memasuki ranah kedua mengenai penanganan peninggalan bawah air. Diawali dengan pengiriman beberapa ahli arkeologi dalam program-program yang diselenggarakan oleh SPAFA (Seameo Project of Archaeology and Fine Arts). Dengan adanya program kerjasama ini kegiatan penelitian arkeologi bawah air dilaksanakan pertama kali pada tahun 1981 (perairan Tuban, Jawa Timur), dan dilanjutkan pada tahun 1983 dan 1986 di lokasi yang sama. Akan tetapi, akibat berbagai kendala menyebabkan pengembangan arkeologi bawah air mengalami kemandegan. Termasuk dalam hal ini banyaknya kepentingan menyangkut benda berharga asal muatan kapal karam yang diperoleh melalui ekspedisi pengangkatan.

Upaya ke arah pengembangan ini digiatkan kembali pada akhir 1990-an. Ditandai dengan dimuatnya deklarasi bahwa Arkeologi Bawah Air harus dikembangkan di Indonesia pada kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia di Yogyakarta. Upaya ini makin intensif dengan diadakannya diskusi dan seminar yang bertema maritim. Diantaranya, tahun 2000 diselenggarakannya Diskusi “Harta Karun Bawah Air-Tantangan Bagi Arkeolog”. Pada tahun 2001 dalam Diskusi Ilmiah Arkeologi XIV yang diselenggarakan di Makassar. Tema yang didiskusikan adalah “Hubungan Maritim antara Indonesia dengan Wilayah Sebelah Timurnya”. Selanjutnya pada tahun 2002

pada seminar Eksplorasi Sumberdaya Budaya yang diselenggarakan di Jakarta atas kerjasama Pusat Studi Jepang dengan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Universitas Indonesia. Dan pada tahun 2005 dibentuklah sebuah direktorat baru dalam lingkup Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang bernama Direktorat Peninggalan Bawah Air. Adapun ruang lingkup tugas direktorat ini adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peninggalan bawah air. Pembentukan direktorat baru ini sebelumnya telah dirintis dengan dibentuknya Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (Kepres 107 tahun 2000). Dan dibentuknya Sub Direktorat Pengendalian Peninggalan Bawah Air yang berada di bawah Direktorat Purbakala pada tahun 2001 (No. KEP-06/KMKP/2001).

Uraian di atas memberi gambaran tentang ruang lingkup dan sejarah pengembangan kajian arkeologi maritim di Indonesia. Namun hingga saat ini perhatian terhadap kajian arkeologi maritim di Maluku dirasakan masih kurang. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional tentang pola kemitraan dalam setiap kegiatan penelitian yang diadakan oleh Balai Arkeologi di daerah. Pengembangan ini tentunya membuka peluang peningkatan kerjasama antar berbagai pihak dalam penelitian dan pemanfaatan peninggalan arkeologi maritim.

2. Pengembangan Arkeologi Maritim (Alasan Instansional)

Dalam hal pengembangan Arkeologi Maritim di wilayah Kepulauan Maluku beberapa alasan yang bersifat instansional dapat dikemukakan diantaranya ; penetapan lima tema utama penelitian, penetapan highlight penelitian untuk Balai Arkeologi Ambon (Balar Ambon) serta arah kebijakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional tentang perlunya membangun kemitraan dalam setiap kegiatan penelitian.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dalam arah kebijakan telah menyusun tema penelitian. Penetapan lima tema utama penelitian tersebut didasarkan pada keberhasilan Puslitbang Arkenas memberikan penjelasan tentang beberapa permasalahan

selama PJPT I (1969-1994). Kelima tema tersebut kemudian disusun untuk PJPT II (1995-2020), yaitu:

1. proses dan aliran migrasi nenek-moyang bangsa Indonesia dan keturunannya sampai dengan tumbuhnya puak-puak;
2. proses persentuhan budaya Nusantara dengan tradisi-tradisi besar (Hindu-Budha, Islam, dan Eropa);
3. adaptasi dan tumbuhnya budaya-budaya lokal yang diperkaya oleh masuknya anasir-anasir budaya daeri luar (*local genius*);
4. proses terjadi dan berlangsungnya diversifikasi kultural;
5. proses dan kelangsungan integrasi budaya dalam lingkup dan wawasan nasional.

Dari keseluruhan tema yang dikemukakan di atas sebagian besar berusaha menjelaskan proses budaya yang terjadi di Nusantara yang merupakan wilayah kepulauan. Dengan kata lain tema-tema tersebut dapat dijelaskan dengan melakukan kajian kemaritiman.

Balai Arkeologi Ambon sebagai instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang penelitian budaya masa lampau telah menetapkan periode kolonial sebagai highlight penelitian. Untuk dapat melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap periode kolonial dapat ditelusuri melalui pelabuhan-pelabuhan tradisional di daerah pesisir yang terbentang di Kepulauan Maluku sebagai pintu gerbang kedatangan bangsa Eropa. Kajian kemaritiman dalam hal ini menjadi sebuah keharusan.

Rencana Induk Penelitian Arkeologi Nasional (RIPAN) yang telah disusun pada tahun 2003 disebutkan bahwa ke depan penelitian yang akan dilakukakn hendaknya melibatkan pihak-pihak lain. Tentunya dengan pengembangan arkeologi kemaritiman banyak pihak yang dapat dilibatkan.

3. Pengembangan Arkeologi Maritim di Kepulauan Maluku (sebuah potensi)

Potensi sumberdaya budaya maritim telah dikemukakan oleh Mundardjito (2002), yang digolongkan dalam tiga golongan yaitu :

1. Benda-benda arkeologis, baik yang berada di dasar laut maupun pesisir yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan seperti kapal beserta peralatannya (artefak), pelabuhan, dermaga

(featur) dan hasil bumi, bentuk-bentuk permukaan bumi yang digunakan sebagai acuan pelayaran (ekofak).

2. Benda-benda arkeologis yang bernilai sejarah tetapi belum dilindungi oleh perundang-undangan, diantaranya naskah atau dokumen tertulis.
3. Masyarakat yang hingga kini masih hidup dan benda-benda buatan manusia yang berperan dalam kehidupan mereka (Mundardjito, 2002).

Potensi sumberdaya arkeologi maritim Kepulauan Maluku juga dapat dilihat berdasarkan profil wilayah kerja Balai Arkeologi Ambon. Wilayah kerja Balai Arkeologi Ambon yang mencakup wilayah Kepulauan Maluku yang secara astronomis terletak pada 3° LU, 8°.20' LS, 124° BT dan 135° BB. Wilayah ini diapit oleh pulau Sulawesi di bagian barat dan pulau Irian di bagian timur serta dari utara oleh negara Philipina dan Timor-timur di bagian selatan.

Menurut Ambary (1998:150), wilayah Maluku menarik perhatian para ahli dari berbagai disiplin ilmu, hal penting tentang wilayah ini pada umumnya menonjolkan beberapa fenomena mendasar, yakni:

1. Dari segi zoogeografi, wilayah ini merupakan wilayah transisi antara dua lini fauna yakni Wallacea dan Weber (Bellwood, 1978: 37)
2. Dari segi geolinguistik, wilayah kepulauan Maluku umumnya dianggap sebagai bagian dari tanah asal suku-suku bangsa pemakai bahasa-bahasa Austronesia (Andili, 1980)
3. Dari segi geokultural, wilayah ini merupakan lintasan strategis migrasi-migrasi manusia dan budaya dari Asia Tenggara ke wilayah Melanesia dan Mikronesia, Oceania dan ke arah timur (Shutler dan Shutler, 1975: 8-10), yang diikuti oleh perkembangan budaya wilayah timur sejak ribuan tahun lalu.

4. Dari segi ekonomi, wilayah ini pada umumnya merupakan wilayah penghasil rempah-rempah paling utama, yang antara lain menyebabkan wilayah tersebut menjadi ajang potensial pertarungan kepentingan hegemoni ekonomi, dan akhirnya bermuara pada pertarungan politik dan militer (Meilink-Roelofs, 1962:93-100).

Dengan demikian, wilayah kepulauan Maluku yang terdiri dari ribuan pulau dan dipisahkan oleh lautan menjadi potensi yang dapat dikembangkan dalam hal kajian kemaritiman.

Selanjutnya, berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di wilayah ini memperlihatkan bahwa budaya maritim telah dikenal sejak jaman prasejarah. Berikut ini gambaran tentang budaya maritim di Kepulauan Maluku:

▪ **Periode Prasejarah**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan budaya maritim yang pernah ada dan berkembang di wilayah ini, dapat diidentifikasi telah berlangsung sejak adanya persebaran bangsa dari daratan Asia ke bagian barat dan timur bahkan sampai Pasifik. Persebaran bangsa-bangsa dari Asia daratan kemudian membawa budaya beliang persegi. Hal yang menarik dari adanya migrasi ini adalah dikenalnya teknologi perahu cadik. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa penelitian terhadap lukisan dinding gua di wilayah Maluku memiliki persamaan dengan lukisan dinding gua yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Irian bahkan Pasifik (Haris Sukendar, 2001). Pada masa megalitik dikenal pula sistem religi berkenaan dengan keberadaan sebuah perahu, disebutkan bahwa orang yang telah meninggal kemudian dikubur pada wadah perahu dengan maksud bahwa perahu tersebut digunakan oleh sang arwah menuju dunia selanjutnya. Di Maluku Tenggara ditemukan pula pagar batu (*dwala*) berbentuk perahu dan sebuah susunan batu yang digunakan sebagai tempat upacara oleh masyarakat di desa Maluku Tenggara.

▪ **Periode Klasik**

Sumber sejarah berupa naskah kuno menyebutkan wilayah Kepulauan Maluku diantaranya; Gurun/Maluku, Wu nu ku/Maluku, dan Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, Seran/Seram, Ambwan/Ambon, Wanda/Banda.

Periode ini dikenal dengan masa kejayaan Majapahit, dalam Kitab *Negarakertagama* disebutkan bahwa wilayah Kepulauan Maluku berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Dengan demikian, kontak dengan dunia luar telah berlangsung pada periode ini dengan adanya perahu cadik ganda seperti yang ada pada relief-relief candi Borobudur (Haris Sukendar, 2001). Temuan-temuan yang membuktikan hal ini adalah arca Perwujudan di Ternate dan makam seorang Panglima kerajaan Majapahit di Maluku Tenggara yang sebelumnya telah menetap dengan membawa pengaruh Hindu-Budha di wilayah ini.

▪ **Periode Islam**

Masuk dan berkembangnya budaya Islam di Kepulauan Maluku sangat didukung oleh kegiatan perdagangan/pelayaran antar pulau yang mulai ramai sejak berkembangnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pada masa sebelumnya (Klasik). Bahkan tradisi lisan menyebutkan bahwa kontak tidak hanya dengan para pedagang nusantara tetapi juga para pedagang Arab telah berlangsung sejak abad XIV yang kemudian memperkenalkan agama Islam. Pelabuhan-pelabuhan tradisional yang ada pada masa itu yang mendukung kegiatan pelayaran/perdagangan diantaranya Hitu (pulau Ambon), Iha (pulau Saparua Ternate), Tidore, Bacan dan Jailolo (Maluku Utara). Kepulauan Maluku sebagai penghasil rempah-rempah sangat menarik para pedagang untuk datang sekaligus membawa jenis-jenis produk lain untuk ditukarkan.

▪ **Periode Kolonial**

Perdagangan antar pulau yang telah dirintis pada periode sebelumnya sekaligus menarik bagi para pedagang dari luar, tidak terkecuali bangsa Eropa. Pada awalnya penjelajahan mereka ke nusantara dengan tujuan ekonomi dan penyebaran agama. Akan tetapi

melihat sumber daya alam yang dimiliki wilayah ini akhirnya berusaha untuk dikuasai dan dieksplorasi. Jalur-jalur pelayaran yang telah dirintis kemudian semakin ramai, penelitian yang ada menunjukkan bahwa wilayah Kepulauan Maluku sarat dengan tinggalan yang berasal dari periode kolonial. Hampir seluruh kota yang ada di Maluku dan Maluku Utara menjadi kota-kota penting pada periode ini. Hal ini tidak lepas dari strategi dagang yang diterapkan, daerah-daerah yang menjadi kantong produksi dikuasai untuk memudahkan pengawasan. Sementara itu dikembangkan pula daerah pengumpul untuk kemudian dikirim ke Eropa yaitu Ternate, Ambon dan Banda. Selanjutnya, pembangunan benteng-benteng pertahanan pada periode ini selalu ditempatkan di daerah pesisir. Hal ini, bila dikaitkan dengan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa kolonial dapat disebut sebagai strategi/taktik perang maritim.

Potensi lain sehubungan dengan arkeologi bawah air berupa kapal-kapal karam yang membawa berbagai macam barang dagangan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Departemen Eksplorasi Laut dan Perairan (sekarang Departemen Kelautan dan Perikanan) menyebutkan bahwa potensi kelautan non hayati Indonesia sekurangnya terdapat 463 lokasi kapal karam antara tahun 1508 sampai dengan tahun 1878 yang sebagian besarnya adalah kapal dagang VOC (Soesilo, 2000).

Untuk dapat menelusuri perlu dikemukakan jalur-jalur pelayaran yang ramai pada saat itu. Cortesau (1944) mengemukakan bahwa jaringan perdagangan barat-timur menciptakan dua jalur pelayaran penting. Pertama adalah jalur pelayaran dari Malaka menyusuri pesisir utara pulau Sumatera, Jawa terus ke Nusa Tenggara hingga pulau Flores dan berlayar memasuki Maluku bagi yang mencari rempah-rempah dan yang mencari kayu cendana memasuki perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Timor dan Sumba. Pelayaran balik pula mengikuti jalur yang sama. Jalur lain, menurut catatan Tome Pires, selain jalur itu terdapat pula jalur dari Malaka ke Tanjungpura ke Makassar dan selanjutnya melalui Buton sebelum menuju ke Maluku dan kembali dengan jalur yang sama (Cortesau, 1944:226 dalam Poelinggomang, 2001:3).

Gambaran lain ditampilkan oleh Hall dalam mendeskripsikan pelayaran pelaut dan pedagang Jawa ketika zona perdagangan Laut

Jawa berada dalam hegemoni Majapahit. Diungkapkan bahwa pelayaran dilakukan dari Jawa dengan menelusuri pesisir utara pulau-pulau di Nusa Tenggara hingga memasuki Maluku dan kembali dengan menelusuri jalur utara hingga Makassar. Sebelum ke Malaka berlayar ke Jailolo (zona perdagangan Laut Sulu) dan kemudian menyusuri pesisir timur Kalimantan dan terus ke Malaka dan baru kembali ke pelabuhan-pelabuhan di Jawa pada awal muson barat laut. Gambaran ini menempatkan jalur selatan dari jaringan perdagangan barat-timur menjadi jalur ke Maluku dan jalur balik menggunakan jalur utara dari perdagangan itu (Poelinggomang, 2001: 4).

Selain jaringan perdagangan itu terdapat pula jaringan perdagangan lain untuk memudahkan disebut jaringan perdagangan utara-selatan. Jaringan ini dimungkinkan oleh adanya muson utara dan muson tenggara. Namun demikian jaringan ini terpusat pada perdagangan Cina. Sejak periode-periode awal pedagang Cina telah memasuki zona perdagangan Laut Jawa. Terdapat tiga jalur penting dalam jaringan perdagangan ini: pertama dari Cina menyusuri pesisir barat Kalimantan terus ke Jawa, kedua melalui Selat Makassar terus ke Nusa Tenggara dan yang terakhir melalui Sulu ke pesisir utara Sulawesi terus ke Ternate dan memasuki Maluku (Poelinggomang, 2001:5).

Sementara titik yang diduga sebagai lokasi kapal karam di wilayah Maluku, yaitu perairan Halmahera, Tidore dan Bacan 16 lokasi, perairan Morotai 7, perairan Ambon-Buru 13 dan perairan Arafura 57 lokasi (Kompas, 2000). Kapal-kapal ini memuat berbagai jenis komoditi dan barang berharga lainnya berupa keramik Cina, dari berbagai jenis dan dinasti, meriam-meriam, potongan emas, perak, mata uang dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat dikemukakan dalam upaya pengembangan arkeologi maritim di Kepulauan Maluku adalah ;

1. Belum ada kajian khusus mengenai teknologi pembuatan perahu tradisional yang digunakan sebagai alat transportasi laut di Maluku.
2. Belum dilakukan penelusuran terhadap pelabuhan-pelabuhan tradisional sebagai pintu gerbang masuknya pengaruh-

pengaruh dari luar

3. Belum ada kajian mendalam terhadap penemuan-penemuan yang diduga berasal dari masa klasik. Kajian ini mengenai hubungan antara wilayah Kepulauan Maluku dengan Kerajaan Hindu-Budha yang ada di Jawa
4. Belum ada konsep baku tentang sejarah dan tradisi maritim yang pernah ada dan berkembang di Maluku
5. Belum diketahui titik-titik lokasi kapal karam dengan tepat.

Permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas sekaligus menjadi potensi bagi pengembangan kajian kemaritiman di Kepulauan Maluku.

4. Manfaat dalam Pengembangan Arkeologi Maritim

Berdasarkan orientasi kajian arkeologi maritim, maka dalam upaya pengembangannya dapat dipisahkan antara kajian budaya maritim, dan yang berhubungan dengan arkeologi bawah air. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya menelusuri segala sesuatu yang terkait dengan kelautan dan pelayaran diantaranya: Departemen Kelautan dan Perikanan, akademisi, instansi pemerintah di bidang kebudayaan (Balai Arkeologi, BKSNT dan Subdin Musjarlah yang ada di Provinsi Maluku dan Maluku Utara), lembaga-lembaga kebudayaan serta sejarawan dan budayawan. Dalam hal ini pihak-pihak tersebut saling bersinergi dan berkoordinasi untuk menghasilkan sebuah konsep yang dapat menjelaskan sejarah dan tradisi serta bukti-bukti peninggalan budaya maritim yang ada dan berkembang di Kepulauan Maluku. Hasil yang diperoleh sekaligus bermuara pada manfaat ideologi, akademik dan ekonomi.

Sementara itu dalam upaya pengangkatan benda-benda arkeologi di bawah air harus melibatkan pihak-pihak yang telah diatur berdasarkan prosedur yang ada. Diantaranya Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Peninggalan Bawah Air, Pusat Survei dan Pemetaan TNI AL serta Pemerintah Daerah.

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan arkeologi maritim adalah pemerintah daerah melalui dinas pariwisata dan akademisi. Pemerintah dalam hal ini berkepentingan untuk memanfaatkan sumberdaya budaya maritim sebagai objek wisata.

Sementara itu, pihak akademisi berharap agar kajian tentang budaya dan tradisi maritim dapat dijadikan sebagai objek ilmu pengetahuan. Demikian halnya oleh masyarakat, kajian tersebut dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan.

Saat ini, pemerintah daerah telah berusaha menggiatkan wisata maritim dengan adanya "Darwin-Ambon Yacht Race" dan "Arumbae Manggurebe (lomba perahu dayung)". Balai Arkeologi Ambon sebagai lembaga penelitian dalam bidang kebudayaan diharapkan mampu memberi kontribusi. Salah satu wujud kontribusi tersebut dapat berupa hasil-hasil penelitian yang menggambarkan tradisi kemaritiman di Kepulauan Maluku. Kontribusi ini sekaligus dapat memberi warna lain bagi wisata maritim dengan adanya publikasi hasil-hasil penelitian yang terkait dengan kemaritiman.

Pemanfaatan sumberdaya budaya maritim khususnya peninggalan arkeologi bawah air terdapat dua pandangan yang saling bertolak belakang. Gawronski (dalam Compendium, 1992:15) mengeluhkan ada dua pandangan yang bertolak belakang mengenai arkeologi maritim. *Pertama*, menganggap bahwa tinggalkan arkeologi bawah-air dari kapal-kapal karam merupakan sumber informasi ilmiah yang kompleks dan beraneka ragam, dan itu dapat digunakan untuk merekonstruksi kegiatan dan tata perilaku, sedangkan pandangan yang *kedua* melihat artefak-artefak yang ditemukan itu semata-mata adalah koleksi benda-benda bersejarah yang mempunyai harga di pasaran (Sedyawaty, 2001:5). Dengan kata lain perbedaan kedua pandangan tersebut terletak pada manfaat akademik dan manfaat ekonomi yang dimiliki setiap sumberdaya budaya. Olehnya itu, arkeolog harus dilibatkan dalam setiap ekspedisi pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang karam. Keterlibatan arkeolog tentunya didasarkan pada tugas yang diembannya yaitu melakukan analisa terhadap benda dan konteks temuan lainnya. Keterlibatan baik pada saat survei maupun pada saat melakukan eksplorasi.

5. Penutup

Pengembangan arkeologi maritim di wilayah Kepulauan Maluku sudah saatnya mendapat perhatian dan perlu dipikirkan bersama. Hal ini mengingat potensi sumberdaya budaya maritim yang ada dan berkembang di wilayah ini. Perhatian terhadap potensi ini tidak

hanya terbatas pada budaya dan tradisi maritim tetapi juga terhadap potensi peninggalan arkeologi bawah air yang dimiliki. Olehnya itu kemitraan antar instansi baik yang ada di pusat maupun yang ada di pusat maupun yang ada di daerah perlu dioptimalkan.

Sangat mungkin, pengembangan arkeologi maritim berpotensi menjadi menjadi sebuah bidang kajian yang bisa mendukung perjuangan Pemda dewasa ini dalam mewujudkan Propinsi Kepulauan. Hal ini karena, harapan Maluku menjadi salah satu propinsi Kepulauan harus didukung oleh kesiapan dan berkembangnya daya dukung pembangunan di semua sektor. Salah satu sektor yang terpenting dalam hal ini adalah sektor sumberdaya kelautan di Maluku. Sementara, potensi sumberdaya kelautan, tak hanya dioptimalkan dari sisi potensi sumberdaya alamnya, namun perlunya mengembangkan sumberdaya kelautan dari sektor sumberdaya budaya maritim. Di beberapa wilayah di Indonesia, hal ini mulai dikembangkan, bahkan di negara-negara maju sektor ini secara pasti telah menjadi bidang *garapan* guna mendukung pembangunan.

Maka, pengembangan sumberdaya kelautan melalui dukungan sumberdaya budaya dan arkeologi maritim menjadi hal yang tak dapat ditunda lagi guna terwujudnya Maluku sebagai propinsi Kepulauan. Jelas, Pusat Penelitian dan Pengembangan arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Ambon dan lembaga-lembaga terkait di bidang kelautan serta peran serta publik secara menyeluruh mesti bergegas untuk saling bergandeng tangan, berpadu satu menjalin sinergitas untuk mewujudkan hal itu.

DAFTAR PUTSKA

- Anonim, 2005,
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Ambary, Hasan Muarif. 1994.
Laporan Penelitian Arkeologi Islam, Ternate, Kecamatan Ternate, Maluku Utara. Balar Ambon (tt).
- ,-----, 1995.
Penelitian Arkeologi Islam Ternate, Bacan, Jailolo, Maluku Utara. Balar Ambon (tt).
- ,-----, 1998,
Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ardiwidjaya.R, dan Gunawan, 2001,
Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam – Prosedur Operasional Pengawasan, Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT, Dalam **Diskusi Ilmiah Arkeologi (DIA) XII**. Makassar IAAI Komda Sulawesi, Maluku dan Irian. (tt).
- Mundardjito, 2000,
Di Balik Lima Tema Utama Penelitian Arkeologi Indonesia. **Proceedings EHPA Jilid 1**. Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Arkeologi Jakarta, halaman 181-192.
- , 2002,
Pelestarian Sumberdaya Budaya Maritim Indonesia. **Makalah** pada seminar Eksplorasi Sumberdaya budaya Budaya Maritim Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Jepang kerjasama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Universitas Indonesia.
- Najemain, 2001,
Menuju Arkeologi Maritim Indonesia. Dalam **Diskusi Ilmiah Arkeologi (DIA) XII**. Makassar IAAI Komda Sulawesi, Maluku dan Irian. (tt).

- Novita, Aryandini, 2003,
Sembarangan Angkat "Harta Karun" Bawah Laut Musnahkan Data Sejarah Budaya Bangsa. Naditira Widya No 11. tahun 2003. Banjarmasin; Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Sedyawaty, Edy, 2001.
Menuju Arkeologi Maritim Indonesia. Dalam **Diskusi Ilmiah Arkeologi (DIA) XII.** Makassar IAAI Komda Sulawesi, Maluku dan Irian. (tt).
- Simanjuntak, Truman dkk 2003,
Rencana Induk Penelitian Arkeologi. Jakarta:Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.
- Suantika, I Wayan, 2005.
Menelusuri Kebudayaan Hindu di Kecamatan Kei Besar dan Kei Kecil; Kabupaten Maluku Tenggara; Provinsi Maluku. Ambon: Balai Arkeologi Ambon. (tt).
- Sudarmika, IGM, 2001.
Laporan Penelitian Arkeologi, di Pulau Lakor, Kecamatan Leti Moa Lakor, Maluku Tenggara Barat. Ambon: Balai Arkeologi Ambon (tt).
- _____, 2001.
Laporan Penelitian Arkeologi di Kepulauan Tanimbarkei Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Tanimbar Selatan, Maluku Tenggara Barat. Ambon: Balai Arkeologi Ambon (tt).
- Sukendar, Haris, 2001,
Peranan Laut Dalam Perkembangan Budaya Sektor Indonesia Barat, Tengah, Timur dan Pasifik, Dalam **Diskusi Ilmiah Arkeologi (DIA) XII.** Makassar IAAI Komda Sulawesi, Maluku dan Irian. (tt).
- Poelinggomang, E.L, 2001,
Perdagangan Maritim Indonesia Jaringan dan Komoditinya, Dalam **Diskusi Ilmiah Arkeologi (DIA) XII.** Makassar IAAI Komda Sulawesi, Maluku dan Irian. (tt).